



# Buletin Parlementaria



Citra  
Positif DPR  
Meningkat  
Tinggi



Tingkatkan  
Kerja Sama  
Pertanian &  
Pertahanan



Cegah  
Impor Tekstil  
Bermotif  
Tradisional  
Indonesia



PDN Lumpuh,  
Pemerintah  
Diminta Jelaskan  
ke Publik



## Revitalisasi Pelabuhan BP Batam Tingkatkan Daya Saing Nasional

Nomor 1300/II/VII/2024 Juli 2024



9 772614 339005



# Revitalisasi Pelabuhan BP Batam Tingkatkan Daya Saing Nasional

**K**omisi VI DPR RI menyoroti langsung perkembangan revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar yang dikerjakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Revitalisasi yang sempat terkendala tersebut kini telah mencapai kemajuan di tahap pertama dan kedua, sehingga menandai kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelabuhan.

"Kerja sama antara dua mitra kerja Komisi VI antara persero yang berada di bawah PT PPA sebagai BUMN dan juga BP Batam. Kerja sama selama ini masih terkendala, namun sekarang kita lihat sudah selesai untuk tahap satu dan tahap dua. Jadi kita akan dorong terus untuk bisa tetap sesuai dengan plan yang ada bisa ke tahap tiga dan seterusnya," ujar Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung saat peninjauan ke Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (20/6).

Revitalisasi bertujuan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan luar



FOTO: MUN/RDH

Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung meninjau Pelabuhan Batu Ampar.

negeri, terutama Singapura. Meskipun volume perdagangan Batam masih tertinggal, adanya *direct call* dari luar negeri ke Batam merupakan langkah maju yang signifikan.

"Sehingga tidak melulu kita tergantung kepada luar negeri, memang

kalau dari sisi volume masih jauh dari Singapura. Tapi paling tidak sekarang sudah ada *direct call* dari luar negeri langsung ke Batam. Jadi kita akan kawal terus supaya Pelabuhan Batu Ampar bisa terus berkembang sesuai dengan rencana bisnis yang sudah disepakati di Komisi VI," tambah Anggota Fraksi NasDem itu.

Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Batam sebagai pusat logistik dan perdagangan internasional. Pelabuhan Batu Ampar diharapkan mampu menampung lebih banyak kapal dan menangani volume kargo yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di negara tetangga.

[mun/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Citra Positif DPR Meningkatkan Tinggi



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat diwawancarai media.

**K**epercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI meningkat tajam. Bahkan, peningkatan apresiasi positif publik terhadap lembaga ini paling tinggi di antara lembaga negara lainnya. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen.

Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan citra DPR ini mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama.

“Alhamdulillah, apabila rakyat dapat merasakan hasil kerja gotong royong seluruh elemen di DPR,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/6).

Sebelumnya, pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5 persen. Sementara pada Oktober 2022, menurut lembaga yang sama, citra DPR ada di angka 44,4 persen. Puan menegaskan, DPR akan terus berkomitmen untuk menjalankan kedaulatan rakyat dengan penuh dedikasi. “Hasil survei Ini akan jadi sumber semangat DPR ke depan untuk lebih baik lagi,” ujarnya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,  
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom.,  
Ubad Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu  
Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio,  
Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti  
Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie,  
Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompol, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlanti, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie,  
Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,  
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,  
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widaywati, Rosnita,  
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Aisyah Salmah,  
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Tingkatkan Kerja Sama Pertanian & Pertahanan

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Kunjungan Kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar (Dubes) Korea Selatan Lee Sang-Deok ke DPR. Kunjungan tersebut diterima Dasco di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Kepada **Parlementaria** usai pertemuan, Dasco mengungkapkan bahwa Korea Selatan tertarik meningkatkan kerja sama bilateral khususnya dalam bidang pertanian. "Duta Besar (Korea Selatan) menyampaikan bahwa mereka tertarik bekerja sama dalam bidang pertanian. Mereka akan konsentrasi membuat alat pertanian baru," ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, ungkap Dasco, Dubes Korea Selatan Lee Sang-Deok juga tertarik berkonsentrasi untuk meningkatkan kerja sama antarkedua negara di bidang energi baru terbarukan.

"Dan kemudian meningkatkan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima Kunjungan Kehormatan (*courtesy call*) Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (H.E) Lee Sang-Deok di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

kerja sama dengan industri pertahanan yang selama ini memang sudah terjadi dan terjalin kerja samayang bagus," pungkas Dasco. Turut hadir Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto. **pun/rdn**



**DUTA BESAR (KOREA SELATAN) MENYAMPAIKAN BAHWA MEREKA TERTARIK BEKERJA SAMA DALAM BIDANG PERTANIAN. MEREKA AKAN KONSENTRASI MEMBUAT ALAT PERTANIAN BARU.**

**Sufmi Dasco Ahmad**

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan [Korekku]

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Cegah Impor Tekstil Bermotif Tradisional Indonesia

Indonesia beberapa saat ini dibanjiri tekstil dan pakaian impor. Mirisnya, kain dan pakaian ini memiliki motif kain tradisional Indonesia seperti motif batik, tenun, sulam, songket dan lain-lain. Sehingga hal ini menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) perlu dicegah dengan regulasi yang masih diterima perdagangan internasional.

“Ini mestinya dicegah dengan regulasi yang masih diterima norma perdagangan internasional. Kain tradisional kita itu warisan leluhur. Ada nilai-nilai dan budaya di sana, bukan hanya soal ekonomi,” katanya dalam keterangan rilis yang diterima **Parlementaria**, Senin (24/6).

Pencegahan ini perlu segera dilakukan agar industri kain tradisional dan seniman kain tradisional tidak punah dan dapat terus berkarya. Jangan sampai dalam jangka panjang, generasi penerus



FOTO: AZK/PDI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

bangsa hanya akan tahu mengenai kain tradisional ini hanya melalui museum.

“Untuk menghasilkan seniman dan pengrajin kain tradisi itu butuh waktu lama. Dan tiap kain tradisional memiliki kekhasan masing-masing. Belum lagi hilangnya lapangan kerja dan potensi ekonomi. Jadi rugi berlipat akibat kita tak memiliki visi budaya dalam masalah ekonomi ini,” tuturnya.

Industri garmen diketahui mengalami kemerosotan akibat banjir impor pakaian jadi maupun impor pakaian bekas. Hal itu terjadi akibat kelebihan suplai di luar negeri dan praktik *dumping*, yang diketahui dilakukan China. Banjirnya produk tekstil ini juga berdampak pada terjadinya Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang masif di industri tekstil. **gal/aha**



**UNTUK MENGHASILKAN SENIMAN DAN PENGRAJIN KAIN TRADISI ITU BUTUH WAKTU LAMA. DAN TIAP KAIN TRADISIONAL MEMILIKI KEKHASAN MASING-MASING. BELUM LAGI HILANGNYA LAPANGAN KERJA DAN POTENSI EKONOMI. JADI RUGI BERLIPAT AKIBAT KITA TAK MEMILIKI VISI BUDAYA DALAM MASALAH EKONOMI INI.**

## Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# PDN Lumpuh, Pemerintah Diminta Jelaskan ke Publik

**A**nggota Komisi I DPR RI Sukamta menuntut penjelasan dari pemerintah terkait gangguan layanan publik yang disebabkan oleh kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN). Menurut Sukamta, masyarakat saat ini merasa gelisah akibat banyaknya informasi simpang-siur yang beredar di media sosial.

Sukamta mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kominfo, harus menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi. Saat ini, seluruh pihak hanya bisa menduga-duga dengan rasa khawatir, apa penyebab gangguan tersebut.

“Serangan siber kah atau gangguan sistem dari internal? dan bagaimana kondisi data-data yang ada? Kominfo juga harus bisa menjamin keamanan data pribadi di dalamnya agar jangan sampai bocor,” ujar Sukamta dalam keterangan yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (24/6).

Sukamta menekankan pentingnya pemerintah untuk menumbuhkan



FOTO: FHN/PDI

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

kepercayaan masyarakat terkait keamanan data pribadi yang disimpan

oleh pemerintah, termasuk di PDN. Ia mengingatkan, sejak proses pendirian PDN, sudah banyak pihak yang mengingatkan mengenai potensi ancaman serangan siber.

“Saya dengar berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan di beberapa waktu sebelum ini. Keamanan dan ketahanan siber di negara kita memang masih lemah. Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin,” tutur Politisi Fraksi PKS tersebut.

hal/rdn



**SAYA DENGAR BERBAGAI PIHAK JUGA SUDAH MENINGATKAN AKAN POTENSI ANCAMAN SERANGAN DI BEBERAPA WAKTU SEBELUM INI. KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER DI NEGARA KITA MEMANG MASIH LEMAH. SKOR INDEKS KEAMANAN SIBER DI INDONESIA BERADA DI PERINGKAT KE-48 DENGAN SKOR 63,64, YANG MASIH BERADA DI BAWAH SKOR RATA-RATA DUNIA YANG MENCAPAI 67,08 POIN,” TUTUR POLITISI FRAKSI PKS TERSEBUT.**

**Sukamta**

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Bahas Isu Politik & Pemerintahan Bersama Dubes Uni Eropa

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang VIP Komisi II tersebut Doli dan Dubes Uni Eropa membahas berbagai peluang kerja sama bisa dilakukan antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa.

“Karena kami yang menerima adalah Komisi II, ada isu-isu yang berkaitan dengan soal politik dan pemerintahan dalam negeri. Tadi kita bicara tentang bagaimana soal penataan otonomi daerah, soal desentralisasi, kemudian juga bicara tentang soal Pemilu,” kata Doli usai pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Doli menambahkan, salah satu pembahasan yang menarik adalah saat membahas tentang pemilu. Uni Eropa cukup tertarik dengan Pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai



FOTO: ENDPDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat bertukar cenderamata usai menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

penyelenggaraan Pemilu terbesar di Indonesia.

“Menurut mereka cukup menarik

Pemilu Indonesia yakni mereka bilang, *this is the biggest election in the world*, karena dilaksanakan dalam satu hari melibatkan 200 juta orang selesai dalam waktu yang singkat gitu itu membuat mereka tertarik dengan untuk mencermati mengamati pemilu di Indonesia,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain membahas soal Pemilu, DPR RI dan Parlemen Uni Eropa juga menyepakati kerja sama dalam pertukaran informasi terkait keparlemenan. Nantinya, Doli mengatakan Komisi II akan membentuk tim bersama dengan Parlemen Uni Eropa untuk saling menggali informasi lebih jauh tentang Parlemen Uni Eropa. **bia/aha**

**KARENA KAMI YANG MENERIMA ADALAH KOMISI II, ADA ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN SOAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. TADI KITA BICARA TENTANG BAGAIMANA SOAL PENATAAN OTONOMI DAERAH, SOAL DESENTRALISASI, KEMUDIAN JUGA BICARA TENTANG SOAL PEMILU.**

**Ahmad Doli  
Kurnia Tandjung**

Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# RUU Kabupaten/Kota Disesuaikan Karakteristik Daerah

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah sedang membahas 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan DPD RI.

Ia menyebutkan catatan pemerintah terhadap 26 RUU kabupaten/kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah. Sedangkan catatan kedua, pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

"Indonesia itu luas, intinya kami bersama dengan pemerintah dan kepala daerah sedang membahas bagaimana idealnya agar nantinya



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin Rapat Panitia Kerja dengan Bupati dari 26 Daerah dan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

26 RUU Kabupaten Kota ini sesuai dengan kemauan kita bersama," kata Syamsurizal dalam Rapat Panitia

Kerja dengan Bupati dari 26 Daerah dan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Sebelumnya, 27 Undang-Undang Kabupaten atau Kota tahap I telah disetujui menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu. Persetujuan pemerintah terhadap 26 RUU Kabupaten/Kota saat ini berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/3495/LG.01.01/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kami sudah menerima masukannya dari Bupati daerah Lampung untuk selanjutnya akan kita bahas di internal," tuturnya. **tn/aha**

**INDONESIA ITU LUAS, INTINYA KAMI BERSAMA DENGAN PEMERINTAH DAN KEPALA DAERAH SEDANG MEMBAHAS BAGAIMANA IDEALNYA AGAR NANTINYA 26 RUU KABUPATEN KOTA INI SESUAI DENGAN KEMAUAN KITA BERSAMA.**

**Syamsurizal**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Kritik Pungli di Lapas yang Sulit Diberantas

**A**nggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengkritisi praktik pungutan liar di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah menjadi hal lumrah dan sulit diberantas, pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Benny juga mempertanyakan apakah kondisi tersebut bisa dapat selesai di masa mendatang atau bahkan lebih subur. "Yang saya tak tahu apakah kedepannya bisa kita hentikan atau tidak. Yang agak aneh sudah dilaporkan ke Kanwil Hukum dan HAM-nya tapi juga, sepertinya dianggap angin lalu," ungkap Benny.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Yasonna yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Menkumham



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) Yasonna H. Laoly di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).



**YANG SAYA TAK TAU APAKAH KEDEPANNYA BISA KITA HENTIKAN ATAU TIDAK. YANG AGAK ANEH SUDAH DILAPORKAN KE KANWIL HUKUM DAN HAM- NYA TAPI JUGA, SEPERTINYA DIANGGAP ANGIN LALU. BAPAK JADI MENKUMHAM 10 TAHUN. TETAPI SELAMA 10 TAHUN ITU, BERTUMBUH SUBUR PUNGLI DI LAPAS DAN RUTAN ITU. SAYA ENGGAK TAHU APA MASALAHNYA.**



**Benny K. Harman** Anggota Komisi III DPR RI

namun pungli masih marak terjadi di lingkungan lapas. "Bapak jadi menkumham 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun itu, bertumbuh subur pungli di lapas dan rutan itu. Saya *enggak* tahu apa masalahnya," kata Benny.

Mendapatkan masukan tersebut, Yasonna menyatakan kalau memang sejatinya pungli yang terjadi di lapas itu sudah seperti penyakit yang tidak ada obatnya. Menurutnya sebagian besar pungli terjadi di lapas yang kelebihan kapasitas oleh narapidana kasus narkoba .

"Untuk mengatakan bebas, agak sulit mengatakan itu. Karena di sana keinginan-keinginan individu dari dalam, kemudian apalagi di lapas-lapas yang kelebihan kapasitas. Ini sering jadi persoalan," ujar Yasonna.

**ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# LPSK Diharapkan Beri Perhatian pada Kasus Viral

**A**nggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, mempertanyakan langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang viral belakangan ini.

“Apa yang sudah LPSK lakukan dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban dari kasus-kasus yang saat ini sedang ramai di masyarakat,” paparnya saat raker Komisi III dengan Ketua LPSK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Adde mengatakan, selain kasus Vina yang menyita perhatian publik, kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga kerap menyita perhatian publik. “Saya berharap bahwa LPSK ini memberikan perlindungan dengan banyaknya kasus-kasus viral saat ini terkait dengan kasus Vina, dan kasus-kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik yang dilakukan oleh para oknum pejabat



Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat diwawancarai usai raker Komisi III dengan Ketua LPSK di ruang rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

di Indonesia ini,” harapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, kasus kekerasan

seksual kerap meningkat di setiap tahunnya oleh sebab itu dia meminta LPSK agar benar-benar memberikan perhatian khusus. “Saya sebagai perempuan di Komisi III berharap khusus untuk TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) ada perhatian khusus karena setiap tahun kasus-kasus TPKS ini bertambah, belum lagi kasus-kasusnya menyita perhatian publik,” tandasnya.

Untuk diketahui rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian LPSK TA 2023, rencana kerja LPSK TA 2024 dan strategi pencapaiannya. Raker juga membahas terkait program penguatan mekanisme nasional dan program optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

— **ssb/aha**



**SAYA BERHARAP BAHWA LPSK INI MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DENGAN BANYAKNYA KASUS-KASUS VIRAL SAAT INI TERKAIT DENGAN KASUS VINA, DAN KASUS-KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MENYITA PERHATIAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PARA OKNUM PEJABAT DI INDONESIA INI.**

**Adde Rosi Khoerunnisa**

Anggota Timwas Haji DPR RI



# Banyak Kios Dirugikan Akibat Tagihan Pupuk Indonesia

**A**nggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia. Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.

“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah di-*bully*, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,” ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).



Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Lanjutnya, ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan

rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.

“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.

Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran.

— rfd, gal/aha

**BANYAK SEKALI KIOS-KIOS YANG MERASA DIRUGIKAN DENGAN ADANYA SURAT TAGIHAN DARI DIRUT PUPUK INDONESIA. MAKA DARI ITU SAYA SARANKAN JALAN KELUARNYA, APAKAH TIDAK SEBAIKNYA MENGHITUNG ULANG KEMBALI NILAI-NILAI TAGIHAN TERSEBUT? KARENA INI SANGAT MEMBERATKAN PARA KIOS DAN JUGA DISTRIBUTOR. SUDAH DI-BULLY, DIANGGAP PEMERASAN APALAGI PENGEMBALIANNYA DENGAN HARGA KOMERSIAL.**

**Endang Setyawati**

Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# POLEMIK 'NATURALISASI' DOKTER ASING

KONSEP NATURALISASI ATAU MENDATANGKAN AHLI DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA TERNYATA TIDAK HANYA ADA PADA TIM SEPAK BOLA. MENTERI KESEHATAN BUDI GUNADI SADIKIN JUGA AKAN MENERAPKAN KONSEP TERSEBUT UNTUK TENAGA KESEHATAN (NAKES) DI INDONESIA.

“  
DOKTER ASING ITU SUDAH DIPUTUS DI UNDANG-UNDANG, KALAU ADA YANG BILANG BAHWA TIDAK SETUJU DOKTER ASING, ITU SAMA SAJA KITA UNDANG-UNDANG SUDAH BILANG KITA MERDEKA, TIDAK SETUJU INDONESIA MERDEKA.  
MENURUT SAYA AGAK ANEH JUGA



**BUDI GUNADI SADIKIN**  
MENTERI KESEHATAN

SUMBER : DIOLAH BERBAGAI SUMBER



**RAHMAD HANDOYO**  
ANGGOTA KOMISI IX DPR RI

“  
MARILAH KITA SUDAHI, KITA BERPIKIR YANG BIJAK AGAR ISU DOKTER ASING, ITU PASTI ADA KAN SUDAH JELAS PRASYARATNYA SEPERTI APA, JANGKA WAKTUNYA BERAPA, SUDAH ADA, DIATUR DI UU (UU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,

- Kehadiran dokter asing di Indonesia sempat menjadi perdebatan.
- Menkes menekankan ini merupakan langkah tepat menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia.

# RUU Pelayaran Dorong Pemberdayaan Pelayaran Rakyat

**A**nggota Komisi V DPR Sri Rahayu menyatakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bertujuan mendorong pemberdayaan pelayaran rakyat. Supaya dapat mewujudkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia.

“Paling penting adalah pelayaran-pelayaran yang diatur ini akan memberikan peningkatan perekonomian bagi warga masyarakat di tempat ini, artinya kalo kita ini kunjungannya di Laboan Bajo, berarti di Laboan Bajo itu sendiri,” kata Sri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR dengan Kepala Kantor Ksop Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun beserta jajaran terkait lainnya di Laboan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/6).

Sebelumnya Sri menjelaskan di Indonesia, dunia Pelayaran sebagai lokomotif utama transportasi



FOTO: G00/PDT

Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR dengan Kepala Kantor Ksop Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun beserta jajaran terkait lainnya di Laboan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (20/6/2024).



**PALING PENTING ADALAH PELAYARAN-PELAYARAN YANG DIATUR INI AKAN MEMBERIKAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN BAGI WARGA MASYARAKAT DI TEMPAT INI, ARTINYA KALO KITA INI KUNJUNGANNYA DI LABOAN BAJO, BERARTI DI LABOAN BAJO ITU SENDIRI.**

**Sri Rahayu**

Anggota Komisi V DPR

distribusi barang dan penumpang di perairan, memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, wisata maupun politik dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia sebagai salah satu negara maritim terluas di dunia dengan luas lautan kurang lebih 3,250 juta kilometer persegi, atau berarti sekitar 62% dari total luas wilayah Indonesia adalah lautan,” ujar Sri. [qq/aha](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Akses Jalan Masih Jadi Sandungan Operasional

**P**elabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat digadang menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan sekaligus masuk dalam jajaran pelabuhan terbesar di tanah air. Sejak diresmikan pada Agustus 2022 lalu, pelabuhan ini belum juga beroperasi secara optimal lantaran belum adanya akses jalan yang memadai.

“Menurut Pelindo tadi, ini sudah siap baik untuk curah kering, kemudian curah basah kemudian juga untuk peti kemas sudah siap semua. Memang kendala seperti yang kita bahas tadi soal akses, jalan akses menuju ke pelabuhan ini. Sehingga masih dibatasi untuk sementara peti kemas tidak di sini karena keterbatasan lebar jalan ke dan keluar dari Pelabuhan ini ya,” jelas Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di tengah peninjauan ke Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat pada Kamis (20/6).

Ia mendorong Pemerintah



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama tim saat peninjauan ke Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (20/6/2024).

untuk segera turun tangan agar pelabuhan tersebut dapat segera beroperasi secara penuh. Dalam

rapat kunjungan kerja spesifik Komisi V di kawasan Pelabuhan Kijing, sempat disinggung mengenai upaya pelebaran jalan dan wacana pembangunan jalan tol sebagai akses menuju dan dari pelabuhan.

“Kalau persoalan jalan ini belum selesai. Apakah bikin jalan tol atau kita bikin jalannya sudah ada *nih* diperlebar menjadi sekian jalur pilihannya ada di pemerintah silakan saja. Yang penting sekarang persoalan jalan menuju ke pelabuhan ini segera kita selesaikan,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut usai rapat dengan PT Pelindo, Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

uc/aha



**MENURUT PELINDO TADI, INI SUDAH SIAP BAIK UNTUK CURAH KERING, KEMUDIAN CURAH BASAH KEMUDIAN JUGA UNTUK PETI KEMAS SUDAH SIAP SEMUA. MEMANG KENDALA SEPerti YANG KITA BAHAS TADI SOAL AKSES, JALAN AKSES MENUJU KE PELABUHAN INI. SEHINGGA MASIH DIBATASI UNTUK SEMENTARA PETI KEMAS TIDAK DI SINI KARENA KETERBATASAN LEBAR JALAN KE DAN KELUAR DARI PELABUHAN INI YA.**

**Lasarus**

Ketua Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sawit Harus Berkontribusi Besar Bagi Penerimaan Negara

**T**im Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Jon Erizal melakukan kunjungan kerja spesifik ke PTPN IV Regional III di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kunjungan kerja tersebut bermaksud untuk melihat secara langsung pengembangan ekosistem Industri Kelapa Sawit Nasional di Provinsi Riau termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanganannya.

Seperti diketahui, Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang menjadi andalan penyumbang ekspor Indonesia. “Saya berharap bahwa BUMN termasuk PalmCo ini harus punya kontribusi besar terhadap penerimaan negara, karena kedepan, pemerintah kita berencana akan menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh sampai dengan delapan persen. Dan pertumbuhan itu harus ada sumber penerimaan negara yang jelas,” ucap Jon Erizal di Kota Pekanbaru, Riau (20/6).



FOTO: DEP/PTI

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke PTPN IV Regional III di Kota Pekanbaru, Riau (20/6/2024).

Jon menyampaikan, selain dari pajak dan hasil utang, sumber penerimaan negara lainnya juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tetapi yang tidak kalah penting menurutnya adalah

penerimaan dari dividen BUMN. “Kalau ini digenjot bisa besar, tentu ini akan menjadi sumber penerimaan yang punya kontribusi terhadap APBN. Sehingga pertumbuhan ekonomi tujuh sampai dengan delapan persen bisa tercapai. Tidak tergantung pada hutang sepenuhnya,” tuturnya.

Disisi lain, lanjut Jon, kita melihat ternyata PalmCo atau BUMN sawit kita ini mempunyai lahan terbesar dibandingkan beberapa perusahaan sawit lainnya. “Tetapi sayang, justru perusahaan-perusahaan swasta lainnya itu yang malah sudah melakukan *downstream* (hilirisasi) sampai kepada tingkat pembuatan kosmetik, selain memproduksi minyak goreng dan margarin,” ungkap Jon.

dep/aha



**SAYA BERHARAP BAHWA BUMN TERMASUK PALMCO INI HARUS PUNYA KONTRIBUSI BESAR TERHADAP PENERIMAAN NEGARA, KARENA KEDEPAN, PEMERINTAH KITA BERENCANA AKAN MENGENJOT PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR TUJUH SAMPAI DENGAN DELAPAN PERSEN. DAN PERTUMBUHAN ITU HARUS ADA SUMBER PENERIMAAN NEGARA YANG JELAS**

**Jon Erizal**

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Insiden Terbakarnya Kilang Pertamina Jadi Pelajaran

**K**ebakaran PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan yang terjadi pada 25 Mei 2024 silam menjadi perhatian Komisi VII DPR RI untuk segera meninjau insiden tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan bahwa kebakaran tersebut sampai saat ini masih dalam proses investigasi mendetail. Karena itu, ia mendorong agar proses ini segera tuntas.

“Insiden kebakaran kilang minyak di CDU IV ini masih dalam proses investigasi yang mendetail. Saat ini sedang dilakukan investigasi oleh tim gabungan Pertamina holding, Ditjen Migas dan Polres Balikpapan,” kata Dony saat diwawancarai **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (20/6).

Dengan adanya insiden ini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (20/6/2024).

itu mendorong Pertamina agar betul-betul melakukan investigasi

agar ke depan kebakaran kilang tidak terulang kembali. Pasalnya target produksi akan tercapai tetapi karena kerap kali terjadi seperti insiden tersebut.

“Ini menjadi pelajaran untuk Pertamina agar tidak mundur lagi dalam proses pencapaian targetnya yaitu (*lifting*) 800.000 barel per hari. Komisi VII DPR RI dan Pertamina agendakan dalam rapat di Jakarta,” jelasnya.

Komisi VII DPR RI pun berharap di tahun 2024 proses produksi sudah berjalan dan pada tahun 2025 target pun bisa tercapai. “Ini sudah *revamping* lagi dan mulai *on stream* semua, mudah-mudahan mega proyek ini bisa terwujud jadi bisa memproduksi minyak di lokal dan tidak *import* dari luar,” pungkas Dony. **cas/rdn**



**INI MENJADI PELAJARAN UNTUK PERTAMINA AGAR TIDAK MUNDUR LAGI DALAM PROSES PENCAPAIAN TARGETNYA YAITU (*LIFTING*) 800.000 BAREL PER HARI. KOMISI VII DPR RI DAN PERTAMINA AGENDAKAN DALAM RAPAT DI JAKARTA.**

**Dony Maryadi**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Sepakati Asumsi Dasar Sektor ESDM 2025

**R**apat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menyepakati *Indonesian Crude Price* (ICP) sebesar 80-85 Dolar Amerika per barel. Selain itu juga menyepakati beberapa asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN tahun 2025 lainnya.

“Untuk *lifting* Minyak bumi sebesar 1,603-1,652 juta BOEPD, Gas Bumi sebesar 1,003-1,047 juta BOEPD. Sementara *cost recovery* sebesar 8,25-8,5 miliar dolar Amerika,” ujar Eddy di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Sedangkan Volume BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi 19,05-19,58 juta kilo liter (KL), dengan perincian minyak tanah sebesar 0,55-0,58 juta KL, dan minyak solar sebesar 18,05-19 juta KL. Sementara



FOTO: GER/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Volume LPG 3 kg sebesar 8,2 juta metrik ton. Sementara Subsidi Tetap Minyak Solar (*Gas Oil 48*)

disepakati sebesar Rp1.000-3.000 per liter. Sementara Subsidi listrik sebesar Rp84-88,36 triliun.

Dalam kesempatan itu juga disepakati Pagu Indikatif Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 9,385 triliun. Tidak lupa Komisi VII DPR RI pun mendesak Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program-program Kementerian ESDM tahun anggaran 2025 dan paling lambat diselesaikan pada bulan Desember 2024.

Khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat disepakati penambahan alokasi anggaran sebesar 1,499 triliun. “Komisi VII DPR RI menyetujui pagu indikatif RKA-K/L Kementerian ESDM tahun anggaran 2025 dengan anggaran Rp 9.385.203.737.000,” pungkasnya.

ayu/aha



**KOMISI VII DPR RI  
MENYETUJUI PAGU  
INDIKATIF RKA-K/L  
KEMENTERIAN ESDM  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN ANGGARAN  
RP 9.385.203.737.000.**



**Eddy Soeparno**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Anggaran Kemenpora, Bukti Nyata Parlemen Dukung Olahraga

Dalam lanjutan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Dito Ariotedjo dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) & Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2025, Kamis (13/6), Komisi X secara resmi mengesahkan menyetujui pada hari ini untuk adanya penambahan anggaran bagi Kemenpora hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp2 triliun.

Penambahan anggaran tersebut bukanlah tanpa alasan. Saat diwawancarai Parlementaria, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan tambahan anggaran itu didasarkan atas keprihatinan terhadap anggaran Kemenpora sebelumnya yang sempat mengalami penurunan padahal prestasi olahraga Indonesia secara nasional sudah mengalami berbagai kemajuan.

Terlebih, dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Dito Ariotedjo di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

lomba internasional lainnya. "Jadi kami Komisi X menyetujui pada hari ini untuk adanya penambahan anggaran bagi Kemenpora sebesar 2 triliun lebih. Semoga dengan demikian akan lebih luasa untuk

kita bisa meningkatkan, bukan hanya prestasi olahraga kita tapi juga membudayakan olahraga," ujar Hetifah di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada dunia sepakbola melalui Tim Nasional (Timnas) Indonesia menorehkan tinta emas dengan mencatatkan sejarah lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Timnas kita atas kerja kerasnya. Dan atas dukungan luar biasa para pecinta sepak bola.

**pun/aha**



**JADI KAMI KOMISI X MENYETUJUI PADA HARI INI UNTUK ADANYA PENAMBAHAN ANGGARAN BAGI KEMENPORA SEBESAR 2 TRILIUN LEBIH. SEMOGA DENGAN DEMIKIAN AKAN LEBIH LELUASA UNTUK KITA BISA MENINGKATKAN, BUKAN HANYA PRESTASI OLAHRAGA KITA TAPI JUGA MEMBUDAYAKAN OLAHRAGA.**

**Hetifah Sjaifudian**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Berantas Budaya Gratifikasi di Proses PPDB

**B**udaya korupsi melalui gratifikasi kerap kali terjadi saat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Modusnya adalah jelang masa-masa akhir seleksi pengumuman PPDB, tiba-tiba informasi pengumuman tidak bisa diakses.

KPK pun telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Ditetapkan pada 16 Mei 2024 lalu, melalui SE ini PPDB diharapkan bisa bersifat transparan dan akuntabel.

Merespons hal ini, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mendukung upaya KPK dalam memberantas budaya gratifikasi di lingkungan pendidikan terutama saat berlangsungnya Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan di



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/6/2024).

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/6).

“Saya sangat mendukung upaya KPK untuk turun langsung ke sekolah-sekolah memberantas praktek gratifikasi di dunia pendidikan. Terutama momentum pendaftaran siswa baru saat ini sudah menjadi rahasia umum marak praktek gratifikasi di lingkungan sekolah dari semua tingkatan, baik SD, SMP hingga SMA,” tegas Nuroji.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini merasa geram dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga pendidikan yang seolah belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Padahal, menurutnya, jika diselidiki secara seksama maka praktek gratifikasi mudah sekali ditemukan.

oji/rdn

**SAYA SANGAT MENDUKUNG UPAYA KPK UNTUK TURUN LANGSUNG KE SEKOLAH-SEKOLAH MEMBERANTAS PRAKTEK GRATIFIKASI DI DUNIA PENDIDIKAN. TERUTAMA MOMENTUM PENDAFTARAN SISWA BARU SAAT INI SUDAH MENJADI RAHASIA UMUM MARAK PRAKTEK GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKOLAH DARI SEMUA TINGKATAN, BAIK SD, SMP HINGGA SMA.**

**Nuroji**

Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tanpa Bansos & Pemilu, Pertumbuhan Ekonomi TW1-2024 Semu

**P**emerintah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan (TW) I 2024 sebesar 5,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo meminta Bank Indonesia untuk hati-hati mencermati angka tersebut lantaran lonjakan pertumbuhan hanya terlihat pada konsumsi pemerintah.

"Kita harus cermati dengan hati-hati karena kalau kita lihat di triwulan pertama itu yang bertumbuh tinggi itu adalah konsumsi pemerintah, kalau kita lihat ini adalah pengeluaran pemerintah karena adanya Bansos dan rangkaian pemilu. Kita bandingkan dengan konsumsi rumah tangganya yang tumbuh rendah sebetulnya," kata Andreas saat Rapat Kerja Komisi XI dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).




FOTO: MUNIPDOT

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, tercantum bahwa

pertumbuhan PDB (yoy) pada triwulan 1 tahun 2024 adalah 5,11 persen. Diperkirakan hal tersebut didorong oleh permintaan domestik.

"Terus kalau kita lihat inflasi inti ya ini juga tertekan, nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya daya beli kita tidak baik-baik saja Pak Gub. Jadi, catatannya menurut saya, ini hati-hati di dalam mencermati pertumbuhan yang 5,11 (persen) ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin pertumbuhan tanpa adanya Bansos dan pemilu ini akan lebih rendah dari 5 persen," ujar legislator Dapil Jawa Timur IV itu.  uc/rdn



**COBA ITU PAK BAHILIL (MENTERI INVESTASI) BAGI-BAGI IUPK UNTUK ORMAS. PADAHAL, KALAU KITA BACA SEKSAMA UU MINERBA, IZIN PERTAMBANGAN ITU DIAJUKAN BADAN USAHA PALING TIDAK KOPERASI. PEMERINTAH AKAL-AKALAN MENGATUR NORMA BAHWA BADAN USAHA YANG SAHAMNYA DIMILIK ORMAS SECARA MAYORITAS. ITU KAN NORMA BARU YANG TIDAK ADA DALAM UU.**

**Andreas Eddy Susetyo**

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Obati Nilai Tukar Rupiah yang Terus Merosot

**D**unia keuangan Indonesia seolah sedang dihantui oleh merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Memasuki kuartal II-2024, nilai tukar Amerika mulai merangsek menyentuh Rp16.000 bahkan pada penutupan perdagangan Jumat (21/6/2024), mata uang Rupiah melemah 20 poin atau 0,12% menuju level Rp16.450.

Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola nilai tukar mata uang nasional. Ia lantas menganalogikannya dengan diagnosa dan pengobatan yang dilakukan dalam dunia kesehatan.

“Kita khawatir, jangan misalkan Bank Indonesia ini salah mendiagnosa. Kalau saya ibaratkan dalam situasi hari ini, karena dengan salah diagnosa tentu akan melahirkan obat yang salah. Intervensi pasar itu selalu sifatnya sesaat dan kita paham betul bahwa kita memiliki cadangan



Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

devisa yang sangat terbatas,” kata Najib dalam Rapat Kerja Komisi XI

dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Politisi PAN ini mendorong agar Bank Indonesia mengembangkan formulasi kebijakan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki daya tahan dan cakupan yang luas. Menurutnya, Bank Indonesia perlu memiliki strategi yang lebih berkelanjutan dan resisten terhadap tekanan eksternal maupun masalah internal, mirip dengan konsep imunisasi yang memberikan kekebalan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

uc/rdn



**KARENA PRESTASI ITU KAN TIDAK MELULU SEBENARNYA UNTUK YANG TIDAK MAMPU TAPI SEBENARNYA YANG DI KELAS MENENGAH INILAH SASARAN UTAMANYA. YANG TADI SAYA BILANG MEREKA INI ADA DI KELOMPOK DI TENGAH-TENGAH. JADI TOLONG PERHATIANNYA JUGA UNTUK KELOMPOK YANG KELAS MENENGAH INI.**

**Ahmad Najib Qodratullah**

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Keluhan Masyarakat Puncak: Eksploitasi Perkebunan Teh Masih Berlanjut

**M**asyarakat di kawasan Puncak, Bogor semakin vokal menyuarakan protes terhadap eksploitasi perkebunan teh yang terus berlanjut. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi, mengemukakan kekhawatiran tersebut dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.

“Saya banyak di protes masyarakat di Dapil saya, Jabar V, karena banyaknya pembangunan komersil di area perkebunan teh yang masih produktif. Bahkan saat ini sisanya tinggal 200 hektar, ini ancaman pak,” tegas Mulyadi saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Ia pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendengarkan keluhan masyarakat. Menurutnya, kawasan kebun teh



Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi saat mengikuti Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

memiliki peran vital sebagai resapan air yang mampu menahan erosi.

“Saat ini warga mulai merasakan dampaknya. Beberapa sumber air yang mengalir ke warga menjadi terganggu,” kata Mulyadi, menggarisbawahi dampak nyata yang

dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia juga menekankan bahwa alih fungsi perkebunan teh saat ini merupakan ancaman serius.

Maka itu, ia mengkritik pemerintah untuk tidak membuka investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Dengan semakin maraknya pembangunan komersil di area tersebut, Mulyadi berharap pemerintah segera membuat kebijakan yang mempertahankan kelestarian lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal. “Puncak sekarang bukan hanya macet saja pak, tanaman juga rusak. ayo kita sama sama ke sana kita lihat pak, kesian masyarakat pak,” tutupnya.

rnm/aha

**SAYA BANYAK DI PROTES MASYARAKAT DI DAPIL SAYA, JABAR V, KARENA BANYAKNYA PEMBANGUNAN KOMERSIL DI AREA PERKEBUNAN TEH YANG MASIH PRODUKTIF. BAHKAN SAAT INI SISANYA TINGGAL 200 HEKTAR, INI ANCAMAN PAK.**

**Mulyadi**

Anggota Banggar DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Kelola PMN Secara Efektif dan Optimal

**W**akil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno menilai sangat penting bagi perusahaan BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) agar efektif dan optimal mengelola pendanaan yang disalurkan. Khususnya bagi perusahaan yang memegang peran dalam percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tak terkecuali PT Pelindo (Persero), menurut Hendrawan, perusahaan tersebut juga perlu mengelola pendanaan PMN dalam rangka pengembangan Pelabuhan Bena secara efektif, efisien dan optimal. Terlebih Pelabuhan Bena merupakan salah satu pintu masuk internasional yang berperan penting terhadap ekosistem wisata dan ekonomi Bali.

“Khususnya untuk Pelabuhan



FOTO: SRW/PDT

Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Bena, Denpasar, Bali pada Kamis (21/6/2024).

Bena menjadi Pelabuhan yang berdaya saing internasional, sebagai

pintu masuk dari pengembangan pariwisata dan ekosistem pariwisata di Bali dan pulau-pulau sekitarnya,” ucapnya saat dimintai keterangan Parlemen di sela kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Bena, Denpasar, Bali pada Kamis (21/6).

Melihat perkembangan dari pengembangan Pelabuhan Bena yang prospektif, ia optimis berharap Pelabuhan tersebut di tahun 2026 dapat menerima kapal lebih banyak. Bila hal itu dapat terealisasi, maka Indonesia dapat menjadi salah satu destinasi wisata top dan menjadi sorotan dari radar wisatawan internasional.

“Bahkan diperkirakan bisa sampai 6 ribu kapal sandar per tahun, dan dari 6 ribu itu sebagian merupakan kapal yang berdaya tampung 3-4 ribu orang,” jabar Legislator Dapil Jawa Tengah X tersebut. **srw/aha**

**KHUSUSNYA UNTUK PELABUHAN BENA MENJADI PELABUHAN YANG BERDAYA SAING INTERNASIONAL, SEBAGAI PINTU MASUK DARI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKOSISTEM PARIWISATA DI BALI DAN PULAU-PULAU SEKITARNYA.**

**Hendrawan Supratikno**

Wakil Ketua BAKN DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



**TNR**  
PARLEMEN

JURNALISME  
INVESTIGASI  
DIKEBIRI  
DEMOKRASI  
MATI

#TOLAKRUUPENTYARAN

Banyak banget  
Pasal Karetnya  
#TOLAKRUUPENTYARAN

DUKUNGAN  
TO...  
**AKSI DEWAN**

MENDENGAR-MELIHAT-MEMBANGUN

SAKSIKAN HANYA DI

<http://tvrp.parlemen.dp.r.go.id/>

SCAN  
HERE!!

